

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SERTA KEMANDIRIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Vera Sri Endah Cicilia, Sri Murni, Daisy M. Engka
vcycilia@yahoo.com

Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi

ABSTRACT

Keuangan daerah saat ini menjadi salah satu bentuk pertanggung jawaban dan wujud dari desentralisasi keuangan maupun kewenangan dari pusat ke daerah. Daerah yang mampu mengelola keuangannya secara efektif dan efisien tentu diharapkan mampu merangsang perekonomian melalui penyerapan anggaran di sector-sektor produktif dan potensial yang dimiliki sehingga secara menyeluruh akan mampu meningkatkan kemandirian dan kemampuan keuangan daerah. Dalam penelitian ini digunakan analisis rasio efektifitas dan rasio efisiensi untuk melihat sejauh mana pemerintah kabupaten minahasa utara mengelola keuangan yang dimiliki dan mampu meningkatkan perekonomiannya. Penghitungan rasio yang dilakukan menghasilkan angka efisiensi rata-rata diatas 75 persen selama tahun penelitian (2009 - 2013), sementara untuk efektivitas kinerja mencapai angka rata-rata 90 persen per tahunnya.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Efektivitas, efisiensi.

ABSTRACT

Analysis of the efficiency and effectiveness as well as the independence of financial management in the North Minahasa district.

The financial area is currently one of the forms of accountability and financial and form of decentralization of authority from the center to the regions. Areas that are able to manage its finances effectively and efisien certainly expected to stimulate the economy through absorption in the productive sectors and the potential possessed so thoroughly will be able to increase the independence and financial kemampuan area.

This study used a ratio analysis of the effectiveness and the efficiency ratio to see how far north Minahasa district government-owned financial management and improve its economy.

Calculations performed ratios produce an average efficiency rate above 75 percent during the study year (2009 -2013), while for the effectiveness of the performance reached an average of 90 percent per year.

Keywords: Local Revenue, effectiveness, efficiency

PENDAHULUAN

Latar belakang

Di dalam suatu Negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu system pemerintahan (governance) yang baik. Sistem ini sangat baik di perlukan sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan public di berbagai daerah dan sebagai alat bagi masyarakat setempat untuk berperan serta aktif dalam menentukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya sendiri selaras dengan peluang dan tantangan yang di hadapi dengan koridor-koridor kehidupan nasional.

Pembangunan ekonomi diarahkan pada mantapnya ekonomi nasional dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Salah satu ciri demokrasi ekonomi adalah perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antara daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendaya gunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal. Upaya peningkatan pembangunan daerah harus didasarkan pada otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mendorong pemerintah membangun di seluruh tanah air.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu lapangan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Adapun masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang

didasarkan ciri khas daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber fisik secara lokal (daerah).

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan dan memperluas peluang kerja bagi masyarakat harus bersama-sama mengambil inisiatif dalam memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal dalam membangun daerah untuk kesejahteraan masyarakat. (Todaro : 1999)

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selalu menciptakan pertumbuhan ekonomi, pembangunan harus berupaya untuk menghapus atau mengurangi kemiskinan. Kabupaten Minahasa Utara relatif muda dalam usia pemerintahan, tetapi Kabupaten ini merupakan pusat kegiatan perekonomian sejak masih menjadi bagian dari Kabupaten Minahasa, Dengan terbentuknya Kabupaten Minahasa Utara menjadi pemerintahan sendiri akan lebih menjanjikan dalam pengembangan perekonomian dimasa mendatang, terutama di era otonomisasi seperti sekarang ini.

Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk melaksanakan pembangunan, dimana pembiayaan tersebut berasal dari APBD. Searah dengan adanya otonomi daerah maka daerah-daerah harus mengelola keuangan daerahnya secara baik. Menurut (Mardiasmo, 2002), perlimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, pemanfaatan, dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Oleh karena itu pengelolaan keuangan yang di lakukan dengan efisien dan efektif harus dilakukan secara optimal, karena hal ini berkaitan dengan target dan realisasi penerimaan daerah, dan ternyata realisasi seringkali tidak sesuai dengan target, disini timbul pertanyaan mengapa demikian? karena hal ini berkaitan dengan dana pembangunan. Kalau pengelolaan keuangannya sudah efisien dan efektif ini berarti bahwa adanya suatu jaminan ketersediaan dana pembangunan, dan kalau pengelolaannya belum efisien dan efektif maka perlu untuk didorong atau digenjut lagi agar supaya pengelolaannya akan lebih membaik dan ini akan menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan itu sendiri, sehingga hal ini akan menjamin kemandirian keuangan daerahpun semakin lama semakin membaik.

Pendapatan asli daerah merupakan indikator kemandirian suatu daerah. Artinya semakin meningkatnya proporsi penerimaan PAD terhadap keseluruhan penerimaan pendapatan daerah yang ditunjukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah tersebut menunjukkan kemandirian dalam hal pembiayaan pembangunan daerahnya.

Untuk mengembangkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas nyata dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah secara ekonomis,efisien,efektif,transparan dan akuntabel. Elemen manajemen keuangan daerah yang di perlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi (Devas,dkk 1989) :

Akuntabilitas ;

Value for money;

Kejujuran dalam mengelola keuangan public;

Transparansi;

Pengendalian;

Dalam rangka pertanggungjawaban public,pemerintah daerah melakukan optimalisasi anggaran yang di lakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukan bahwa manajemen keuangan daerah masih kurang efektif. Anggaran daerah khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai kontributor dalam mendorong laju pembangunan di daerah.

Di Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kabupaten Minahasa Utara yang merupakan daerah baru hasil dari pemekaran daerah Kabupaten Minahasa. Sejak berdirinya Kabupaten Minahasa Utara, perkembangan perekonomiannya semakin membaik walau kadang perkembangannya mengalami fluktuasi. Perkembangan ini dapat di lihat dari tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1
Pertumbuhan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara 2009-2013

Tahun	Penerimaan (Rp)	Pertumbuhan (%)	Pengeluaran (Rp)	Pertumbuhan (%)
2009	191.561.136.065	-	151.462.505.984	-
2010	155.412.909.870	(18)	125.125.539.890	(17,37)
2011	202.125.479.671	30,06	155.387.915.590	24,19
2012	257.287.760.949	27,29	203.377.919.985	30,88
2013	326.447.645.970	26,88	249.169.447.429	22,52

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa Utara (Data di olah)

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Di mulai pada tahun 2010 pertumbuhan penerimaan mengalami minus 18 persen begitu juga dengan pertumbuhan pengeluaran yang mengalami minus sebesar -17,37%. Kemudian di tahun 2011 mengalami pertumbuhan baik dari segi penerimaan maupun pengeluaran. Dari segi penerimaan dapat dilihat pertumbuhan yang dialami dari -18% menjadi 30,06% begitu juga dengan sisi pengeluaran meningkat dari -17,37% menjadi 24,19%. Pada tahun yang selanjutnya adalah tahun 2012, pada tahun ini penerimaan mengalami penurunan dari 30% menjadi 27%, tetapi dari sisi pengeluaran mengalami peningkatan dari 24,19% menjadi 30,88%. Namun pada tahun yang terakhir adalah tahun 2013, di tahun ini dari sisi penerimaan maupun pengeluaran mengalami penurunan. Dari sisi penerimaan penurunan yang terjadi mulai dari 27,29% menjadi 26,88% begitu juga yang dialami dari sisi pengeluaran penurunanpun terjadi dari 30,88% menjadi 22,52%. Sehingga dengan demikian selama periode 2005-2009 penerimaan daerah ini mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 16,56%. Dan dari sisi pengeluaran selama periode 2009-2013 total pengeluaran daerah Kabupaten Minahasa Utara mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15,06%.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, kita dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan di atas adalah :

“ Bagaimanakah tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Minahasa Utara ”.

Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang diuraikan dalam rumusan permasalahan, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah :

“ Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Minahasa Utara.”

Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah ;

- Dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi semua pihak, serta sebagai rekomendasi kepada pemerintah dalam melihat Tingkat Efisiensi Dan Efektifitas di Kabupaten Minahasa Utara.
- Dapat dijadikan acuan bagi semua pihak terkait dalam melihat Tingkat Efisiensi dan Efektivitas di Kabupaten Minahasa Utara.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Otonomi Daerah

Salah satu fenomena paling menonjol dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dengan pembangunan adalah ketergantungan daerah yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat.

Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan. Daerah kehilangan keleluasaan bertindak (*local discretion*) untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap daerah. Menurut Allen (*dalam* Kuncoro, 2004: 3), tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat.

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.

Menurut Sidik *et.al* (2004: 9), desentralisasi tidak berarti memberikan kewenangan penuh tanpa batas kepada pemerintah daerah, yaitu pemerintah pusat pada tingkat terakhir yang bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kepada masyarakat.

Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2008: 60) menegaskan, desentralisasi sendiri tidak boleh dianggap selesai, bahkan apabila urusan pembagian kewenangan dan keuangan antar daerah sudah dianggap beres. Keberhasilan desentralisasi harus diukur dari kemampuan pemerintah daerah yang lebih mandiri dalam menyejahterakan masyarakat lokal sekaligus menjamin hak-hak politiknya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Suparmoko (2002:26) anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Anggaran merupakan alat control atau pengawasan terhadap penerimaan atau pengeluaran dimasa yang akan datang. Sejak tahun 1967 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di Indonesia disusun dan diberlakukan mulai tanggal 1 april sampai dengan 31 maret tahun berikutnya. Namun khusus tahun 2000, tahun anggaran di mulai pada tanggal 1 april dan berakhir pada tanggal 31 desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Selanjutnya sisi penerimaan disebut juga sumber penerimaan daerah, menurut penjelasan UU RI No.32 tahun 2004.

Pembangunan Ekonomi

Pengertian terhadap masalah pembangunan ekonomi makin berkembang dan bertambah luas, yang terlihat makin banyak segi-segi yang diperhatikan dalam mengevaluasi suatu proses pembangunan ekonomi. Nampaknya terjadi suatu evaluasi pemikiran para ahli ekonomi dalam menentukan batasan ruang lingkup pembangunan. Mula-mula cukup dengan melihat perkembangan tingkat pendapatan perkapita masyarakat, tetapi sekarang cenderung untuk melihat pembagian hasil yang lebih merata akibat perkembangan ekonomi, baik secara sektoral maupun secara wilayah. Menurut Lincoln Arsyad (2005 : 22-23) pembangunan ekonomi adalah seperti suatu proses agar saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi dapat dilihat dan dianalisis. Dengan cara tersebut bisa diketahui deretan peristiwa yang timbul dan akan mewujudkan kegiatan ekonomi dan taraf kehidupan masyarakat berikutnya . pembangunan perlu dipandang sebagai kenaikan itu merupakan penerimaan dan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Malthus, dalam bukunya *Jhingan M.L.* (1983:452) berpendapat bahwa dia tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malahan proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha yang konsisten di pihak rakyat. Dia tidak memberikan gambaran adanya gerakan menuju stasioner tetapi menekankan bahwa perekonomian mengalami kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi. Jadi menurut Malthus proses pembangunan ekonomi lebih dari sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi.

Menurut Sukirno S. (2006:3-4) di dalam bukunya mengatakan bahwa pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari hal ini di harapkan

kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan akan meningkat dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi.

Dalam analisis pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai proses, supaya saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi dapat dilihat. Dengan cara analisis ini dapat diketahui deretan peristiwa yang akan timbul dan akan mewujudkan peningkatan dan dalam taraf kesejahteraan masyarakat dalam suatu tahap pembangunan ke tahap berikutnya. Selanjutnya pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai suatu kenaikan, itu merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam suatu kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Todaro.M.P. (1994 : 52) berpendapat bahwa dalam istilah ekonomi 'Pembangunan' biasa diartikan sebagai kapasitas dari suatu perekonomian nasional, yang kondisi awalnya lebih kurang statis dalam jangka waktu yang cukup lama untuk berupaya menghasilkan dan mempertahankan kenaikan tahunan produk nasional brutonya, sebuah indeks ekonomi yang umum dipakai untuk mengetahui kemajuan pembangunan adalah menggunakan tingkat pertumbuhan GNP perkapita, agar dapat memperhitungkan kemampuan suatu wilayah untuk mengembangkan outputnya pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduknya. Pembangunan ekonomi didefinisikan kembali dalam rangka pengurangan atau pemberantasan kemiskinan, ketidakmerataan, dan pengangguran dalam hubungan dengan perekonomian yang sedang tumbuh.

Efisiensi dan Efektivitas

Sektor public sering di nilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Oleh karena itu Mardiasmo (2004:4) mendefinisikan bahwa :

Efisiensi adalah pencapaian output yang maximum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu . Efisiensi merupakan perbandingan output/input. Yang di kaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah di tetapkan.

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang di tetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Pengertian efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Ukuran kemampuan yang di maksud dapat bermacam-macam, tergantung daripada sasaran atau tujuan yang ingin di capai atau yang telah di tetapkan. Adapun pengertian efektivitas yang didefinisikan oleh Hans Kartikahadi dalam Agoes Sukirno (2000;180) adalah produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuannya baik di tinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja maupun batas waktu yang di targetkan. Sedangkan untuk Efisiensi di definisikan sebagai bertindak dengan cara yang dapat meminimalisir kerugian atau pemborosan sumberdaya dalam melaksanakan atau menghasilkan sesuatu. Sedangkan Ruchyat Kosasih dalam Agoes Sukirno (2000;180) mendefinisikan efektivitas sebagai "perbandingan masukan-keluaran dalam berbagai kegiatan ,sampai dengan pencapaian tujuan yang di tetapkan,baik di tinjau dari kuantitas (volume) hasil kerja,kualitas hasil kerja maupun batas waktu yang di targetkan". Dan Efisiensi sebagai "bertindak untuk membuat pengorbanan yang paling tepat di bandingkan dengan hasil yang di kehendaki". Suatu organisasi di anggap efektif,bila bisa mencapai tujuan dengan efisien,hemat dan mentaati peraturan yang berlaku.

Pengukuran Efisiensi

Efisiensi di ukur dengan ratio antara output dengan input. Semakin besar output di banding input,maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mardiasmo 2004;133). Dengan demikian efisiensi dapat di rumuskan sebagai berikut :

Rasio Efisiensi

$$= \frac{\text{Biaya Yang dikeluarkan untuk mendapatkan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumusan tersebut penilaian efisiensi dikatakan sangat efisien apabila hasil perhitungan di bawah 60%. Karena efisiensi di ukur dengan membandingkan keluaran dan masukan,maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara:

Meningkatkan output pada tingkat input yang sama.

Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input.

Menurunkan input pada tingkatan output yang sama

Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.

Dalam pengukuran kinerja pengelolaan organisasi sector public, efisiensi dapat di bedakan atas :

Efisiensi Alokasi, Terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumberdaya input pada tingkat efektivitas optimal.

Efisiensi Teknis (Manajerial), Terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumberdaya input pada tingkat output tertentu.

Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu di catat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakantentang berapa besar biaya yang telah di keluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah di anggarkan ,boleh jadi duakali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar. Efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah di ditetapkan (Mardiasmo, 2004 ; 134).

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang di harapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Maka semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan ,maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas lebih berfokus pada pencapaian hasil (outcome). Dengan demikian efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2007;84) :

Rasio Efektvitas

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumusan ini penilaian atas efektivitas dinyatakan sangat efektif apabila hasil perhitungan di atas 100%.

Studi tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi tentu saja tidak dapat mengabaikan kajian terhadap faktor-faktor lain yang ikut menentukan pertumbuhan ekonomi di suatu Negara atau daerah. Vazquez dan McNab (2001) menjelaskan salah satu issue yang perlu diperhatikan untuk studi lanjutan guna memperkuat keyakinan kita terhadap hasil empiris tentang desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi adalah kemungkinan adanya kesalahan dalam spesifikasi model estimasi. Literature tentang pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi mungkin merupakan suatu fungsi dari banyak variabel seperti struktur hukum dan kebebasan ekonomi, tingkat tabungan, perilaku investasi, akumulasi modal, human capital, pengembangan tehnologi, dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Dalam penulisan ini data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diterbitkan atau digunakan oleh suatu lembaga atau instansi yang berkaitan dengan judul penulisan ini. Sedangkan sumber data yang dipergunakan adalah data yang bersumber dari instansi-instansi yang berkaitan dengan penulisan ini, yakni; Biro Statistik Kabupaten Minahasa Utara, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Kantor Pajak dan Retribusi daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, Yang di mana pada tahun 2009 ini sudah di rampungkan/ digabung antara DISPENDA dan Kantor Pajak dan Retribusi menjadi "Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset"

Dikumpulkan berdasarkan rentang waktu tertentu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan suatu kegiatan ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berkurun waktu lima tahun terakhir

yaitu dari tahun anggaran 2005 sampai dengan 2009. Hal ini karena keterbatasan data yang penulis kumpulkan dari sumber data.

Metode Analisis

Metode (alat analisis) yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini adalah metode analisis tabel. Dan analisis tabel ini digunakan untuk menghitung tingkat Efisiensi dan efektivitas dari target dan realisasi penerimaan daerah dalam proses pengelolaan keuangan daerah

Analisis Efisiensi

Untuk Menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di lihat dari sisi pengeluaran maka formula perhitungannya adalah ratio antara penerimaan daerah dengan belanja rutin, dimana semakin kecil rasionya maka semakin efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut. Adapun formula yang di gunakan dalam perhitungan adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang dikeluarkan untuk mendapatkan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui perbandingan pengeluaran dan realisasi penerimaan daerah maka tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di berikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Thn 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun sebagai berikut :

Tabel 2
Kriteria Kinerja Keuangan (Efisiensi)

PRESENTASE KINERJA KEUANGAN	KRITERIA
100% ke atas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Di bawah dari 60%	Sangat efisien

Analisis Efektivitas

Dalam menganalisis tingkat efektivitas dari system pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara maka di perlukan data realisasi penerimaan dan target penerimaan. Dimana semakin besar prosentase yang di capai maka semakin tinggi tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah :

$$\text{Rasio Efektvitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

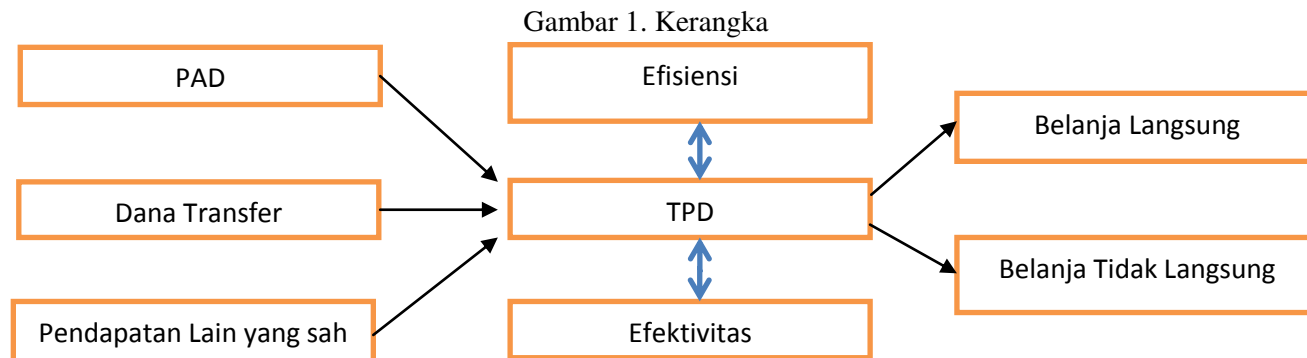
Dengan mengetahui perbandingan hasil target penerimaan dan realisasi penerimaan daerah, maka tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di berikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun sebagai berikut :

Tabel 3
Kriteria Kinerja Keuangan (Efektifitas)

Persentasi kinerja keuangan	Kriteria
100 %	<i>Sangat Efektif</i>
90 % - 100 %	<i>Efektif</i>
80 % - 90 %	<i>Cukup Efektif</i>
60 % - 80%	<i>Kurang Efektif</i>
Di bawah dari 60%	<i>Tidak Efektif</i>

Kerangka Pemikiran

Kerangka Konsep Analisis Efisiensi dan Efektivitas pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Minahasa Utara.



PEMBAHASAN

Analisis Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara

Untuk Menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di lihat dari sisi pengeluaran maka formula perhitungannya adalah ratio antara penerimaan daerah dengan belanja rutin, dimana semakin kecil rasionya maka semakin efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Dengan menggunakan formula tersebut, dapat di ketahui tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang nampak pada tabel berikut :

Tabel 4
Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara 2009-2013

Tahun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Efisiensi (%)
2009	191.561.136.065	151.462.505.984	79,06
2010	155.412.909.870	125.125.539.890	80,51
2011	202.125.479.671	155.387.915.590	76,88
2012	257.287.760.949	203.377.919.985	79,04
2013	326.447.645.970	249.169.447.429	76,33

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa Utara (Data di olah)

Dengan mengetahui perbandingan hasil realisasi belanja rutin dan realisasi penerimaan daerah maka tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Utara di berikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Thn 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun sebagai berikut :

Tabel 5
Kriteria Kinerja Keuangan (Efisiensi)

PRESENTASE KINERJA KEUANGAN	KRITERIA
100% ke atas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Di bawah dari 60%	Sangat efisien

Dari perhitungan pada tabel 5 kemudian dengan menggunakan Kriteria Kinerja Keuangan tersebut di atas dapat di ketahui bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2009 – 2013 menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih baik karena rasionya di bawah 100% dan senantiasa mengalami perkembangan yang mengarah pada tingkatan yang makin efisien. Dimana pada tahun 2009 tingkatannya berada posisi 79,06% atau berada pada kriteria efisien. Kemudian pada tahun 2010 naik menjadi 80,51% atau berada pada cukup efisien. Setelah Kabupaten Minahasa Utara terpisah dari Kabupaten Minahasa Induk, maka kondisi pengelolaan keuangan daerah berada pada tingkatan yang efisien dengan ratio yang semakin menurun, kemudian pada tahun tahun 2011 kondisi pengelolaan keuangan daerah berada pada tingkatan yang efisien dengan ratio sebesar 76,88%. Ratio tersebut terus menurun sampai pada tahun 2013 dengan ratio sebesar 76,33%. Hal ini mengindikasikan bahwa system pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara berkembang ke kondisi yang semakin efisien.

Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara

Untuk menganalisis efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang dilihat dari sisi penerimaan maka formula perhitungannya adalah, ratio perbandingan antara rerealisasi penerimaan dengan target penerimaan, dimana semakin besar ratio yang diperoleh maka semakin efektif pengelolaan keuangan daerah, dan apa bila semakin kecil ratio yang di peroleh maka semakin tidak efektif pula pengelolaan keuangan daerahnya.

Dengan menggunakan formula tersebut ,maka di ketahui tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang nampak pada table berikut:

Tabel 6
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara 2009-2013

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efektivitas (%)
2009	191.915.224.440	191.561.136.065	99,81
2010	188.294.517.256	155.412.909.870	82,53
2011	207.389.479.405	202.125.479.671	97,46
2012	260.158.864.812	257.287.760.949	98,89
2013	330.852.046.486	326.447.645.970	98,66

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa Utara (Data di olah)

Dengan mengetahui perbandingan hasil target penerimaan dan realisasi penerimaan daerah, maka tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Utara di berikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun sebagai berikut :

Tabel 7
Kriteria Kinerja Keuangan (Efektifitas)

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
100 %	<i>Sangat Efektif</i>
90 % - 100 %	<i>Efektif</i>
80 % - 90 %	<i>Cukup Efektif</i>
60 % - 80%	<i>Kurang Efektif</i>
Di bawah dari 60%	<i>Tidak Efektif</i>

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2009 tingkat efektivitasnya sebesar 99,81% sehingga kriterianya mencapai *efektif*. Kemudian di tahun 2010 turun menjadi 82,53% dengan kriteria yang *cukup efektif*. Dan di tahun 2011 tingkat efektivitasnya naik sebesar 97,46% sehingga kriterianya menjadi efektif. Kemudian ditahun 2012 dan 2013 tingkat efektivitasnya mencapai 98,89% dan 98,66% sehingga kriterianya menjadi efektif.

Angka capaian ini mengindikasikan bahwa efektivitas pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara semakin Efektif pada periode Kabupaten Minahasa utara telah terpisah dengan wilayah Kabupaten Minahasa Induk.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat di rumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Utara senantiasa mengalami perkembangan yang mengarah pada tingkatan yang makin efisien. Dimana, pada tahun 2009 tingkatannya berada pada kriteria efisien, yaitu 79,06%. Ratio tersebut terus menurun sampai pada tahun 2013 dengan ratio sebesar 76,33%. Hal ini mengindikasikan bahwa system pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara berkembang ke kondisi yang semakin efisien.

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pengelolaan keuangan daerah tahun 2009-2013 nampak bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berkisar antara 82,83% sampai 99,81%. Angka capaian ini mengindikasikan bahwa tingkat efektivitas pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam mengelola keuangan daerahnya menjadi semakin efektif pada periode Kabupaten Minahasa Utara terpisah dengan Kabupaten Minahasa Induk.

Saran

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan dalam rumusan kesimpulan, maka sebagai implikasinya disampaikan saran-saran sebagai berikut :

Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara harus tetap meningkatkan penerimaan daerahnya terutama penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, meskipun hasil yang telah dicapai sampai pada saat ini masih tergolong cukup baik dengan berupaya untuk menggali potensi-potensi sumber pendapatan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Tingkat efisien pengelolaan keuangan daerah baru mencapai tingkatan yang efisien, oleh karena itu pada tahun-tahun yang akan datang ratio efisiensi pengelolaan keuangan daerah masih perlu di tingkatkan lagi sehingga bisa mencapai tingkatan yang sangat efisien dengan ratio sekitar 60% kebawah.

Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah hampir melampaui target yang di tetapkan, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sangat efektif untuk mengelola keuangan daerahnya terutama pada sisi penerimaan daerah dapat menghitung kembali dengan lebih akurat mengenai potensi-potensi penerimaan daerahnya. Karena kemungkinan selama ini target yang ditetapkan masih belum optimal.

Dalam rangka mengisi pembangunan di era otonomisasi daerah, maka pemerintah daerah harus mengembangkan terus kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan kemudian menempatkan personil SDM yang ada sesuai dengan kualitas dan kemampuan dari masing-masing SDM tersebut sehingga istilah "*the right*

man in the right place” tidak hanya menjadi slogan saja melainkan dapat diterapkan di pemerintahan daerah Kabupaten Minahasa Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2002).**Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Todaro, Michael P. 2000.** Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Devas,Nick Brian Binder,Anne Booth,Kenneth Davey and Roy Kelly,1989,** *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* , UI-Press,Jakarta
- Baridwan, Zaki. 1998.** Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur dan Metode. Yogyakarta: BPFE.
- Mulyadi, 2004.** Sistem Akuntansi. Edisi Kesembilan, Sekolah Tinggi Hukum Ekonomi YKPN, Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2003.** Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta : Erlangga
- Suparmoko M.A.,2002,** *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisipertama, penerbit Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2004** *efisiensi dan efektifitas*, penerbit Andy Jakarta
- Abdul Halim, 2007.** Akuntansi Sektor Publik : pengelolaan keuangan daerah edisi 3 : salemba empat
- Kaho, Josef Riwu.** Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Musgrave, Richard A. dan Peggy Musgrave.** Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek (edisi Bahasa Indonesia) Penerbit Erlangga Jakarta 1993
- Bird, Richard M. & Francois Vaillancourt.** Desentralisasi Fiskal Di Negara-Negara Berkembang, terjemahan Alimizan Ulfa, Gramedia, Jakarta, 2000
- Davey. K.J.** Pembiayaan Pemerintahan : Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga. UI Press, Jakarta, 1988.
- Agoes, Sukirno, 2000.** Auditing, Edisi kedua, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jilid I, Jakarta
- Mahmudi. (2007),** Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.;
- Martinez-Vazquez, J. & McNab, R.M. (2003)** “Fiscal Decentralization and Economic Growth,” World Development, 31(9), 1597–616.
- Halim, Abdul. 2004.** Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.Arsyad,
- Lincolin. 1999.** Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE. Yogyakarta.
- Sukirno Sadono, 2006.** *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke-2, Penerbit Kencana Predana Media Group
- Todaro M. P, (1997)** *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Jilid 1. Penerbit Erlangga Jakarta
- Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994
- Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Minahasa Utara Dalam Angka*, Beberapa edisi
- Undang-Undang Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004, Penerbit Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,Fokusmedia,Bandung
- Undang-undang otonomi daerah,edisi revisi tahun 2006,Penerbit Fokusmedia,Bandung
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerbit Fokusmedia,Bandung
- Soedarmaji (2000)**, tingkat efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi pasar berdasarkan potensi di Kabupaten Sorong.
- Soeratno dan Suparmono (2005)** bagi hasil bukan pajak / sumber daya alam dan penghasilan daerah dalam struktur Pendapatan Asli Daerah struktur Pendapatan Asli Daerah
- Yulianti (2001)** “ Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah (Kasus Kabupaten Malang)”
- Lilies Sertiarti (2003)** Penelitiannya yang berjudul “ Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi daerah (study di Kabupaten bantul Jogjakarta)

Jasagung Hariyadi (2001) Penelitiannya yang berjudul “ Estimasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) serta Derajat Desentralisasi Fiscal Kabupaten Belitung (studi kasus tahun 2001)
Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994